

ABSTRAK

Pengawas ketenagakerjaan adalah instrumen yang paling penting untuk menjalankan fungsi publik administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan ditempat kerja. Tujuan penelitian ini untuk (1) Menganalisa Implementasi Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans terhadap hak-hak buruh/ pekerja pada perusahaan di Wilayah Kabupaten Rembang, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans terhadap hak-hak buruh/ pekerja pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Rembang, (3) Mengetahui solusi bagaimana seharusnya Implementasi tersebut agar mampu mencapai hasil yang ideal dimasa yang akan datang.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data utama terdiri dari lokasi penelitian Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang dan subject penelitian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yang digunakan adalah yuridis – sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan pengamatan di lapangan meliputi wawancara, kuisioner dan observasi adapun analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans terhadap Hak-hak Buruh/ Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku namun untuk mencapai hasil yang optimal dibutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti Dinsosnakertrans, Serikat Pekerja/ Buruh juga para pengusaha. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans terhadap Hak-hak Buruh/ Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Rembang antara lain diketahui bahwa Dinsosnakertrans (Pengawas Ketenagakerjaan) dalam menjalankan tupoksinya belum sepenuhnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), Perusahaan belum seluruhnya memenuhi kewajibannya kepada Buruh/ Pekerja (terpenuhinya gaji buruh/ pekerja sesuai UMK, jaminan kesehatan Jamsostek, BPJS, Prevencia dsb, fasilitas perusahaan, dan pemberian hak cuti buruh/pekerja dsb), Buruh/ Pekerja kurang mengetahui hak dan kewajibannya pada perusahaan karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan, Serikat Pekerja/ Buruh kurang pro aktif dan cenderung pasif dikarenakan Sumber Daya Manusia yang sudah tidak produktif diusianya. Beberapa faktor tersebut menjadi pekerjaan rumah dari Pengawas Ketenagakerjaan yang harus diselesaikan di Wilayah Kabupaten Rembang. (3) Implementasi Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans terhadap hak-hak Buruh/ Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Rembang di masa yang akan datang agar sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), Perusahaan harus memenuhi kewajibannya pada Buruh/ Pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, Buruh/ Pekerja harus mengetahui hak dan kewajibannya pada perusahaan, Serikat Pekerja/ Buruh harus aktif terhadap setiap informasi ketenagakerjaan dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan penetapan batas usia maksimum.

Harapan penulis Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai kebijakan yang tepat untuk melindungi hak-hak buruh/ pekerja di setiap Perusahaan di Wilayah Kabupaten Rembang.

Kata Kunci : Implementasi Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan, Hak-hak Buruh/ Pekerja.

ABSTRACT

Labor Inspectors is the most important for the publik function of the Labor Administration that ensures the implementation of labor laws in the workplace. The aim of this study was to analyze whether the implementations of labor inspector's function of Social, Labor and Transmigration Agency for the rights of workers or employees in companies in Rembang already run optimally, to analyze the factors that affect the implementation of labor inspector's function of the rights of workers or employees in the companies in Rembang Regency, and to determine how the solution should do to be able to achieve ideal results in the future.

The type of data used are primary data and secondary data. Primary data is the main data consisting of research sites of Social, Labor and Transmigration Agency of Rembang and Labor Inspectors employee as subject, the secondary data consist of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The method used in this study is juridical – sociological with data collection through library research, field observations include interviews, questionnaires and observations, the analysis of data using qualitative data analysis with interactive model data.

The results showed that the implementation function of labor inspectors of Social, Labor and Transmigration Agency againsts Labour Rights or Workers in Companies in Rembang already achieve optimum result, the factors that affect the Implementation both externally and internally can be analyzed, resolved and able to reduce the number of employment issues in Rembang, in the future in order to achieve the ideal result that should be achieving a balance between the number of companies registered with the number of labor inspectors inspectors of Social, Labor and Transmigration Agency power in Rembang Regency.

Finally, the author hope that labor inspectors have a control strategies that appropriate and proportionate to face various problems of labor professionally and the effort to protect the rights of workers or laborers in Rembang that synergy with the Goverment Policy with the aim of achieving the protection of rights or employees in every company in Rembang.

Key Word : Implementation of Labor Inspector function, Labour Rights/ Labor.